

## PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI INDONESIA

### *IMPLEMENTING A TRANSPARENT AND ACCOUNTABLE EDUCATION FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN INDONESIA*

Norsiva<sup>1</sup>, Suraijiah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email kontributor: [norsyifabalangan01@gmail.com](mailto:norsyifabalangan01@gmail.com)

#### Abstrak

---

Sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang efisien, transparan, dan akuntabel sangat krusial untuk mencapai tujuan pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan alokasi dana yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan keberlanjutan program pendidikan. Meskipun Indonesia terus meningkatkan anggaran pendidikan, berbagai masalah terkait pengelolaan keuangan, seperti prosedur distribusi dana yang tidak tepat dan pengawasan yang kurang efektif, masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia serta mengeksplorasi tantangan dan solusi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini mengkaji konsep dasar pengelolaan keuangan pendidikan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, regulasi pemerintah terkait anggaran pendidikan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem yang transparan dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan keuangan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, penerapan teknologi informasi, dan pembenahan regulasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia.

**Kata kunci:** *Pengelolaan keuangan pendidikan, Transparansi, Akuntabilitas, Tantangan, Solusi.*

---

## Abstract

---

An efficient, transparent and accountable education financial management system is crucial to achieving the goals of national education in Indonesia, as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 20/2003 on the National Education System. Good financial management will ensure the targeted allocation of funds to improve the quality of education and prevent budget misuse that could be detrimental to the sustainability of education programs. Although Indonesia continues to increase its education budget, various problems related to financial management, such as inappropriate fund distribution procedures and ineffective supervision, remain a major challenge. This study aims to analyze the implementation of a transparent and accountable education financial management system in Indonesia and explore the challenges and solutions to improve financial management in the future. Using a qualitative approach and literature review, this research examines the basic concepts of education financial management, the importance of transparency and accountability, government regulations related to education budgets, and the challenges faced in implementing a transparent and accountable system. The results show that despite efforts to improve transparency and accountability, there are still various obstacles, such as limited human resource capacity and infrastructure that support effective financial management. Therefore, it is necessary to increase human resource capacity, implement information technology and improve regulations to improve the education financial management system in Indonesia.

**Keywords:** Education Financial Management, Transparency, Accountability, Education System, Challenges, Solutions

---

## PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu elemen krusial dalam pembangunan sektor pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel menjadi hal yang sangat mendasar. Keuangan pendidikan yang dikelola dengan baik akan memastikan alokasi dana yang tepat sasaran untuk peningkatan kualitas pendidikan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan keberlanjutan program-program pendidikan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003)

Menurut (Mulyono, 2019:123) dalam rangka kemajuan pendidikan di Indonesia, sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang akuntabel dan transparan menjadi perhatian yang semakin penting. Alokasi anggaran yang tepat dan efektif merupakan komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan sistem pendidikan itu sendiri dalam konteks upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan. Dalam hal ini, akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan akan menjamin bahwa dana yang dialokasikan akan digunakan untuk meningkatkan standar pendidikan dan bukannya disalahgunakan.

Meskipun Indonesia terus meningkatkan anggaran untuk pendidikan, hasilnya sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak masalah dalam pengelolaan keuangan yang menjadi penyebabnya, termasuk prosedur distribusi dana yang tidak tepat, pengawasan yang tidak memadai, dan kurangnya teknologi yang mampu memberikan data yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh (Mulyono, 2019:136) menunjukkan bahwa masih ada masalah transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan di beberapa daerah di Indonesia, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana anggaran sekolah digunakan.

Selain merugikan sistem pendidikan itu sendiri, pengelolaan keuangan pendidikan yang tidak transparan dan tidak akuntabel juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional, sistem yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pendidikan harus diterapkan (Hidayat, dkk, 2021:98). Adopsi sistem informasi keuangan berbasis digital dapat mengurangi praktik korupsi dan pelanggaran anggaran, menurut penelitian Prasetyo dan Anggraeni (2020), yang juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi informasi dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia, serta mengeksplorasi tantangan dan potensi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu library research (Sugiyono, 2019:47). Metode library research merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pencarian dan membaca berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diinginkan penulis. Penulis juga mengambil sumber-sumber dari jurnal Online yang relevan dengan materi yang dibahas penulis (Sari, M & Asmendri, 2020:33). Juga

menggunakan studi literatur sebagai metode dalam penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, didasari oleh berbagai buku sebagai sumber referensi serta mempertimbangkan sudut pandang para ahli yang relevan. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Kehidupan sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi lainnya, sangat ditentukan oleh keuangannya, yang sangat terkait dengan kesulitan keuangan. Ada tiga komponen utama dalam upaya pembiayaan organisasi. Penganggaran atau persiapan anggaran adalah yang pertama. Untuk mendukung kelancaran operasionalnya, setiap organisasi membutuhkan anggaran, termasuk mengalokasikan dana untuk berbagai proyek dan kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua adalah pembukuan, kadang-kadang dikenal sebagai akuntansi, yang merupakan fungsi pengelolaan pembiayaan yang terkait dengan manajemen keuangan yang komprehensif.

Dua komponen utama dari pengelolaan keuangan adalah manajemen administratif, yang melibatkan kewenangan untuk memutuskan kebijakan penerimaan dan pengeluaran dana, dan manajemen yang berkaitan dengan tindak lanjut dari kegiatan pertama, yang biasanya ditangani oleh bendahara dan melibatkan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana. Ketiga, audit atau pemeriksaan, yang mencakup semua tugas yang berkaitan dengan tanggung jawab bendahara dalam menerima, menyimpan, dan membelanjakan dana. Pihak yang berwenang melakukan peninjauan ini untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum dan pedoman yang relevan (Suyatno, dkk, 2023:770).

Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan dalam tiap golongan pemerintah, orang tua, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai (Papilaya, 2022:12-13).

Manajemen pengelolaan pembiayaan pendidikan ialah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan haruslah melalui proses sebagai berikut diantaranya perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan biaya Pendidikan.

## **Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan menurut (Rahmawati & Purnama, 2021:220) sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk sektor ini digunakan secara efisien dan akuntabel. Dalam konteks pendidikan, transparansi berarti memberikan akses yang luas dan mudah dimengerti kepada publik terkait informasi anggaran, perencanaan, serta pelaksanaan penggunaan dana. Hal ini termasuk laporan tahunan, anggaran yang terperinci, serta rincian pembelanjaan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Transparansi anggaran ini berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan dana, serta menciptakan rasa percaya dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.

Namun, meskipun Indonesia telah berupaya meningkatkan transparansi dalam sektor pendidikan, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam penelitian oleh (Mulyani & Fadhilah, 2019:102) adalah kurangnya akses mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi anggaran, serta rendahnya kemampuan masyarakat untuk menganalisis dan mengkritisi laporan tersebut. Banyak laporan anggaran yang tidak disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh publik, sehingga masyarakat kesulitan untuk menilai apakah alokasi dana sudah tepat sasaran atau tidak.

Selain itu, penerapan transparansi anggaran juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan komitmen pemerintah daerah. Meskipun kebijakan transparansi sudah ada di tingkat pusat, implementasinya sering kali terganjal oleh kekurangan sumber daya, baik dari segi teknologi maupun kapasitas SDM di daerah. Misalnya, tidak semua sekolah atau instansi pendidikan memiliki sistem informasi yang memadai untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan terperinci kepada publik. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah juga enggan untuk mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap karena adanya ketakutan terhadap potensi pengawasan yang lebih ketat (Rahmawati & Purnama, 2021:232).

Untuk meningkatkan transparansi, perlu dilakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi informasi. Yang menurut (Pramesti & Mulyanto, 2020:58) penggunaan sistem berbasis online untuk melaporkan dan memantau penggunaan anggaran pendidikan dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pelatihan bagi pengelola keuangan di tingkat sekolah dan daerah juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya transparansi dan cara menyusun laporan yang jelas serta dapat dipahami oleh masyarakat luas. Dengan begitu, diharapkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pendidikan akan meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan sektor pendidikan secara keseluruhan.

### **Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan menurut (Suhartini, 2020:245) berarti bahwa pemerintah dan lembaga pendidikan harus bertanggung jawab untuk menjelaskan penggunaan dana publik dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan terperinci, yang dapat diaudit oleh pihak yang berwenang, serta menjelaskan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas juga melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran dana untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Menurut (Suhartini, 2020:258), banyak pengelola keuangan di sekolah dan pemerintah daerah yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, laporan keuangan yang disusun sering kali tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dan kurang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga sering kali tidak maksimal, baik karena keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, maupun karena mekanisme pengawasan yang lemah.

Selain itu, menurut (Syafri, 2021:345) inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan akuntabilitas. Meskipun ada pedoman yang jelas mengenai penggunaan anggaran pendidikan, praktik di lapangan seringkali menyimpang dari pedoman tersebut. Misalnya, meskipun dana BOS telah disalurkan dengan tujuan yang jelas, dalam beberapa kasus, dana tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di tingkat lapangan masih belum optimal.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu adanya reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan yang melibatkan perbaikan kapasitas SDM, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penguatan sistem audit internal dan eksternal juga sangat diperlukan untuk memeriksa keakuratan laporan keuangan. Di samping itu, mekanisme pelaporan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia (Nugroho & Sulastri, 2019: 123).

### **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Regulasi dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, beberapa kebijakan utama terkait pengelolaan anggaran pendidikan mencakup Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu,

kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diperkenalkan untuk mengurangi ketimpangan dalam pembiayaan pendidikan juga berperan dalam mengatur alokasi dana pendidikan secara nasional (Wahyudi, 2021:49).

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, tantangan utama terletak pada implementasi di tingkat daerah. Penelitian (Wahyudi, 2021:34) menunjukkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman teknis terkait pengelolaan keuangan pendidikan, banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan benar. Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan di pusat dan kondisi yang ada di daerah. Ketidakmampuan daerah untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat menyebabkan kebijakan yang baik di tingkat nasional kurang efektif di lapangan.

Ketidakmerataan sumber daya dan kapasitas di berbagai daerah juga menjadi hambatan dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang baik. Beberapa daerah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi keterbatasan dalam sistem administrasi keuangan yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya pelatihan bagi pengelola keuangan di tingkat lokal sering kali mengakibatkan penyalahgunaan dana atau pemborosan yang tidak terdeteksi (Hidayat, 2020: 225). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengelola keuangan di tingkat daerah menjadi langkah penting untuk mengurangi kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan kebijakan, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan yang lebih intensif kepada pengelola keuangan di daerah. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas untuk pelaporan dan pemantauan penggunaan dana pendidikan juga dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan yang ada (Putra, 2019: 166).

### **Tantangan dalam Menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Pendidikan yang Transparan dan Akuntabel**

Penerapan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan anggaran pendidikan. (Hermawan & Sari, 2022:287) menunjukkan bahwa banyak pengelola keuangan di tingkat daerah yang tidak memiliki pelatihan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan publik, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan dan penggunaan anggaran. Tanpa pemahaman yang cukup, pengelolaan keuangan akan sulit dipertanggungjawabkan dan rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan dana.

Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan realitas di lapangan. Meskipun ada pedoman yang jelas, penerapannya di tingkat daerah sering kali tidak berjalan sesuai rencana karena faktor-faktor seperti ketidaksiapan teknologi, infrastruktur yang terbatas, serta rendahnya tingkat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dengan baik sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana pendidikan yang ada (Suyanto, 2020:157).

Masalah birokrasi yang lambat dan sering kali tidak efisien juga menjadi tantangan besar. Proses administratif yang berlarut-larut dan terfragmentasi menghambat kelancaran penggunaan anggaran, terutama dalam hal pencairan dana untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kondisi ini memperburuk pengelolaan dana pendidikan yang lebih efisien, sehingga menurunkan kualitas pendidikan di banyak daerah. Reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi administrasi pendidikan menjadi penting untuk mengatasi masalah ini (Nugroho & Dwiastuti, 2021: 214).

Solusi untuk tantangan ini mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, penyederhanaan prosedur administratif, serta penggunaan teknologi informasi yang lebih baik untuk memonitor dan mengelola anggaran secara transparan. Dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, diharapkan pengelolaan dana pendidikan akan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Penerapan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan signifikan, meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan dengan efisien, tepat sasaran, dan bebas dari penyalahgunaan. Meskipun regulasi dan kebijakan yang ada sudah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya di tingkat daerah sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan, perlu dilakukan beberapa langkah penting.

Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif. Kedua, implementasi sistem informasi berbasis digital yang dapat memberikan akses yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat terkait penggunaan anggaran pendidikan. Ketiga, penguatan sistem pengawasan dan



audit, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terakhir, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keseragaman dalam pengelolaan keuangan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan demikian, meskipun ada berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel, langkah-langkah strategis yang tepat dapat memperbaiki sistem ini, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamidah, A. Z. (2021). *Konsep dan implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah*. Jurnal Muftadiin, 8(02).
- Hermawan, A., & Sari, R. (2022). *Tantangan dalam menerapkan sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel di Indonesia*. Jurnal Keuangan dan Manajemen Pendidikan, 11(4).
- Hidayat, H. (2020). *Peran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 14(3).
- Hidayat, R., & Salim, M. (2021). *Evaluasi implementasi sistem e-budgeting dan e-reporting di pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik, 14(1).
- Mulyani, S., & Fadhilah, F. (2019). *Pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan: Tantangan dan peluang*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 8(2).
- Mulyono, A. (2019). *Pengelolaan dana pendidikan di daerah: Masalah dan solusi*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 7(2).
- Mulyono, A. (2019). *Pengelolaan dana pendidikan di daerah: Masalah dan solusi*.
- Nugroho, F., & Sulastri, I. (2019). *Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan: Studi kasus di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 8(2).
- Nugroho, S., & Dwiastuti, D. (2021). *Tantangan pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia: Analisis dan solusi*. Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, 12(2).
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Pasaman: CV. Azka Pustaka.
- Pramessti, M., & Mulyanto, S. (2020). *Transparansi keuangan sektor pendidikan dalam perspektif good governance*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 12(1).
- Putra, M. (2019). *Analisis kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 8(2).
- Rahmawati, D., & Purnama, A. (2021). *Efektivitas transparansi anggaran pendidikan di Indonesia*. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, 7(3).
- Suhartini, D. (2020). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia: Masalah*

*dan solusi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 15(3).

Syafrizal, M. (2021). *Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 6(4).

Suryanto, S. (2020). *Tantangan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pendidikan*. Jurnal Administrasi Publik, 9(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Wahyudi, R. (2021). *Regulasi dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik, 10(1).

Suyatno, A., Leuhery, F., Agustinus, J. W., Lubis, F. M., & Harahap, M. A. K. (2023). *Pengaruh flexible working space dan organizational culture terhadap produktivitas kerja: Literature review manajemen sumber daya manusia*. Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), 7(1).